

Judul : Soal amandemen UUD 1945, jaga stabilitas politik
Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Soal Amandemen UUD 1945 Jaga Stabilitas Politik

ANGGOTA Komisi V DPR Irwan Fecho menolak tegas wacana Pemilu Presiden-Wakil Presiden melalui Amandemen kembali UUD 1945. Selain dapat menciptakan ketidakstabilan politik, wacana untuk mengembalikan sistem pemilu Presiden ke MPR akan mengganggu konsolidasi demokrasi yang baru saja berlangsung.

"Ini kan kita baru selesai pilpres ya, presiden terpilih saja belum dilantik. Energi politik bangsa seharusnya difokuskan pada implementasi program Prabowo-Gibran, bukan pada perubahan konstitusional yang mendasar. Itu yang lebih dibutuhkan rakyat saat ini," tegas Irwan, kemarin.

Atas dasar itu, dia menilai usulan amandemen saat ini justru bisa memperburuk polarisasi politik di masyarakat. "Seharusnya wacana yang dibangun adalah tentang mempersatukan masyarakat, bukan malah membuatnya terpolarisasi," tambah politisi Fraksi Demokrat ini.

Terpisah, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai wacana untuk mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 sebenarnya sudah mengemuka selama beberapa tahun terakhir ini.

Wacana ini sehat, dan bukan tanpa alasan. Bukan juga tanpa sebab. Empat kali pemilihan presiden memperlihatkan banyak eksese negatif karena perilaku politisi yang melanggar aturan main, politik uang, praktik politik curang dan banyak lagi hal negatif lainnya.

"Indonesia memang berhasil menjalankan demokrasi langsung ini meskipun banyak kelemahan, tetapi tampil di kancah internasional sebagai salah satu (negara) demokrasi terbesar di dunia," ujarnya.

Didik mengatakan, wacana untuk melakukan Amandemen terhadap Konstitusi muncul, bahkan sejak lima tahun yang lalu di mana Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengemukakan wacana ini. Namun tidak ada kelanjutan dan aksi secara politik, sampai pada akhirnya Gerindra juga membantah sebagai pihak yang menyuarakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

"Memang pernyataan yang baru ini sebagai bantahan dan terkait dengan pilkada yang sedang akan berlangsung tahun 2024 ini," sambungnya seraya menyematkan sejumlah link pernyataan Prabowo di berbagai media *online* terkait Amandemen ini. ■ KAL